

PERAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS DALAM RANGKA MENYUKSESKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU

Darus¹, Fahrial¹ dan Randa Achmad Efendi²

¹ Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UIR

² Mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UIR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap peran Kelembagaan agribisnis dan bentuk peranan lembaga agribisnis dalam membantu petani menghadapi berbagai permasalahan usahatani dan peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilaksanakan secara survei dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Responden penelitian sebanyak 40 orang petani padi yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lembaga pascapanen adalah jenis kelembagaan agribisnis yang “sangat berperan dalam pengembangan usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu dengan perolehan rata-rata skor 4, 38. Sementara kelembagaan yang peranannya kurang dirasakan petani adalah lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan usahatani padi dengan skor 2, 61 kategori “ cukup berperan “.

Kata Kunci: Padi, Kelembagaan Agribisnis, peranan.

PENDAHULUAN

Program Ketahanan pangan menjadi suatu hal yang terus di upayakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. FOA mendefenisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunyai kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga baik dalam segi jumlah maupun kualitas dalam pemenuhan standar gizi (Hanafie, 2010). Hal tersebut tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Perkembangan komoditi padi Provinsi Riau mengalami perubahan yang fluktuatif terutama pada selama sepuluh tahun terakhir (2009 - 2018). Luas panen, produksi GKG dan produksi beras Provinsi Riau mengalami peningkatan masing masing 4,45% pada luas lahan, 8,17% Produksi GKG, 8,17% produksi beras pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Namun demikian untuk tahun-tahun

berikutnya mengalami penurunan. Peningkatan produktivitas kembali terjadi pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun setelahnya. Sampai saat ini Riau masih mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui hasil produksi beras daerah sendiri, dimana pada tahun 2018 mengalami defisit 429.000 ton beras sekaligus sebagai peringkat ke lima provinsi yang mengalami defisit beras di Indonesia.

Menurut survey pertanian Rokan Hulu adalah salah satu sentra produksi padi Provinsi Riau dengan produksi padi ladang terbesar sebanyak 31.007 ton Gabah Kering Panen (GKP) dan padi sawah tujuh terbesar dengan panen sebanyak 18.715 ton GKP pada Tahun 2015 (BPS Riau, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani sebagai pihak yang seharusnya menerima jasa dari kelembagaan agribisnis, terhadap peran kelembagaan agribisnis dalam membantu petani menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu. Dan untuk mengetahui bentuk peranan dari masing-masing lembaga agribisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juli sampai Oktober 2019 menggunakan metode survei. Populasi penelitian adalah petani yang melaksanakan usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah responden penelitian sebanyak 40 orang petani padi yang melakukan usahatani padi sawah atau padi ladang di Kecamatan Rokan IV Koto, Rambah, Rambah Samo dan Tambusai yang dipilih secara acak sederhana. Pemilihan kecamatan tersebut dikarenakan empat kecamatan tersebut memiliki potensi desa yang besar dalam pengembangan padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Rokan Hulu selain itu sistem keragaan usahatani padi yang diterapkan relatif homogen.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan kelompoknya, untuk selanjutnya dianalisis. dan dilakukan pembahasan. Untuk menjawab tujuan penelitian, analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian pertama

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui persepsi petani terhadap peran kelembagaan agribisnis dalam membantu petani menghadapi berbagai

permasalahan dalam pelaksanaan usahatani padi dan peningkatan produktivitas Di Kabupaten Rokan Hulu adalah skala *Likert's Summated Rating* (SLR). Analisis skala likert merupakan teknik *selfreport* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang suatu pernyataan, dengan memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui pernyataan berskala mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Petani akan diminta memberikan penilaian mereka melalui skala penilaian denganskala tertinggi skor 5 dan skala terendah skor 1. Perhitungan rentang skor terhadap skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rentang skor penilaian} = \frac{\text{Skala tertinggi} - \text{skala terendah}}{\text{jumlah skala}} - 0,01$$

$$\text{Rentang skor penilaian} = \frac{5 - 1}{5} - 0,01 = 0,79$$

Berdasarkan perhitungan skor diatas, maka rentang skor yang digunakan untuk menilai tingkat peran masing-masing lembaga agribisnis menurut pernyataan-pernyataan yang diberikan petani adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rentang skor penilaian petani atas peran kelembagaan agribisnis

Kategori Nilai	Skala	Skor Penilaian
Sangat Berperan	5	4,20 – 5,00
Berperan	4	3,40 – 4,19
Cukup Berperan	3	2,60 – 3,39
Kurang Berperan	2	1,80 – 2,59
Sangat Kurang Berperan	1	1,00 – 1,79

2. Tujuan penelitian kedua

Untuk mengetahui peranan dari masing masing lembaga digunakan analisis deskriptif, dimana data-data peneitian yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi, dianalisis dan diuraikan dengan dikaitkan pada teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Produktivitas seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri yang akan mempengaruhi sifat dan sikap dalam pengambilan suatu keputusan.umur, pendidikan, lama pengalaman usahatani dan jumlah tanggungan keluarga merupakan faktor internal responden yang dibahas pada penelitian ini. Umur responden penelitian sebagian besar

berada pada rentang umur produktif menurut BPS yaitu 14-54 tahun sebanyak 60 persen, sementara yang berada pada umur tidak produktif >54 tahun sebanyak 40 persen. Pendidikan petani responden sebagian besar berada pada tingkat pendidikan 10-12 tahun (SMA) sebanyak 45 persen. Lebih dari 50 persen petani memiliki jumlah tanggungan keluarga 2 -5 orang, dan banyaknya jumlah anggota keluarga tiap petani menjadi sumber tenaga kerja dalam keluarga bagi kegiatan usahatani. Bertani merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Kecamatan Rokan Hulu. Lahan yang dimiliki dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif dengan membudidayakan tanaman perkebunan seperti karet dan sawit, tanaman buah-buahan, dan tanaman pangan terutama padi. Rata-rata petani memiliki lahan padi seluas 0,9 Ha, dimana 45 persen petani memiliki lahan padi seluas >0,5 Ha sampai 1 Ha dan kurang dari 13 persen yang memiliki lahan besar dari 1 ha. Mengenai status kepemilikan lahan, sebanyak 85 persen petani mengelola lahan dengan status milik sendiri sementara 15 persen adalah petani penyakap dengan sistem bagi hasil 4:1 dalam bentuk gabah kering giling (GKG), dimana 4 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan.

Persepsi Petani Terhadap Peran Kelembagaan Agribisnis

Rokan Hulu menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang perekonomiannya sebagian besar di dukung potensi bidang pertanian. Data BPS Kabupaten Rokan Hulu (2019) mencatat 40,09 % penduduk yang berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, di antaranya petani padi dengan sistem irigasi maupaun tegalan dan juga memiliki lahan perkebunan karet dan kelapa sawit. Secara keseluruhan petani menyatakan bahwa kelembagaan agribisnis “berperan” dalam pengembangan usahatani padi yang dijalankan, dimana rerata skor yang diperoleh 3,55. Lembaga pascapanen memperoleh skor tertinggi dari enam kelembagaan agribisnis yang turut berperan dalam mendukung petani menjalankan kegiatan usahatani yaitu dengan perolehan skor 4,38 kategori “sangat berperan”, sementara lembaga yang memperoleh skor terendah adalah lembaga keuangan dengan perolehan rerata skor 2,61 kategori “cukup berperan”. Berikut disajikan tabel rekapitulasi peran kelembagaan agribisnis dalam mendukung usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 3. Rekapitulasi Peran Lembaga Agribisnis dalam Peningkatan produktivitas Usahatani Padi Di Kabupaten Rokan Hulu.

Lembaga Agribisnis	Skor	Kategori
Lembaga Penyedia Sarana Produksi	3,75	Berperan
Lembaga Permodalan	2,61	Cukup Berperan
Lembaga Pascapanen	4,38	Sangat Berperan
Lembaga Petani	3,63	Berperan
Lembaga Penyuluh	3,77	Berperan
Lembaga Pemerintah	3,14	Cukup Berperan
Peran Lembaga Agribisnis	3,55	Berperan

Sumber: Data olahan, 2019

Peran Kelembagaan Agribisnis Dalam Usahatani Padi

Lembaga Penyedia Sarana Produksi

Kegiatan usahatani padi yang dikembangkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu umumnya menggunakan sistem irigasi teknis dan lahan tegalan, dengan produktivitas produksi mencapai 4-5 kwintal per ha lahan. Terjaminnya ketersediaan sarana prasarana produksi memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan suatu usaha. Kemudahan yang diterima petani dalam mengakses kebutuhan sarana produksi juga dapat menunjang peningkatan produksi usaha tani. Untuk menjalankan usahatani padi petani membutuhkan berbagai input sebagai bagian dari sarana prasarana produksi seperti tenaga kerja, benih, pupuk, herbisida, pestisida, insektisida dan alat-alat pertanian lainnya. Sebagian dari kebutuhan input usahatani tersebut dapat disediakan oleh petani sendiri sehingga dapat mengurangi anggaran pembiayaan dalam menjalankan usaha tani, seperti penyediaan benih dari hasil panen musim tanam sebelumnya dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga untuk beberapa kegiatan usahatani.

Tabel 4. Keadaan Penyediaan Sarana Produksi Usahatani Padi di Kabupaten Rokan Hulu

Saprodi	Selalu Tersedia	Tempat Memperoleh			Kondisi Ketersediaan Saprodi					
		1	2	3	Jenis	Jumlah	Mutu	Waktu	Harga	Dosis
Benih	88,4	92,5	2,5	5,0	100	92,5	90,0	95,0	92,5	97,5
Pupuk Kimia	80,8	0,0	70,0	30,0	77,5	67,5	62,5	62,5	75,0	70,0
Pestisida/insektisida	84,4	0,0	0,0	100,0	87,5	80,0	70,0	75,0	75,0	80,0
Rata-rata	84,2	30,8	24,2	45,0	88,3	80,0	74,2	77,5	80,8	82,5

Sumber: Data Olahan, 2019

Keterangan:

Tempat Memperoleh Saprodi

1. Sumberdaya Petani Sendiri
2. Bantuan Pemerintah
3. Kios Pertanian

Kebutuhan petani akan benih adalah 25-30 kg per ha lahan, adapun varietas padi yang digunakan petani Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari varietas

lokal, logawa, Ciherang, Inpari 30, Inpari 6, dan batubara. Mengenai pengadaan sarana produksi benih sebagian besar petani (85 persen) menyatakan sarana produksi benih selalu tersedia sesuai kebutuhan dan sesuai berdasarkan kriteria 6 tepat. Terpenuhinya kebutuhan benih diperoleh 92,5 persen petani dari sortasi hasil panen musim tanam sebelumnya dengan pertimbangan hasil panen yang akan diperoleh tidak jauh berbeda dan biaya pengadaan benih dapat di tiadakan.

Kebutuhan akan pupuk menjadi penting bagi pertumbuhan tanaman guna memperoleh produktivitas tanaman yang optimal. Petani padi di Kabupaten Rokan Hulu masih menggantungkan kebutuhan nutrisi tanaman pada pupuk kimia. Rata-rata kebutuhan petani terhadap pupuk per ha lahan adalah 100-150 kg urea, 45-50 kg TSP, dan 30-45 kg KCL. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk sebanyak 62,5 persen petani menyatakan kebutuhan terhadap pupuk kimia selalu tersedia. Rendahnya persentase petani yang menyatakan saprodi pupuk selalu tersedia dari benih dan pestisida karena petani menggantungkan kebutuhan pupuk pada bantuan pupuk kimia bersubsidi yang disediakan pemerintah melalui kelompok tani pada setiap desa dan kecamatan secara gratis. Adapun jenis pupuk kimia NPK yang disubsidi pemerintah kepada petani adalah 115 kg/ha/musim tanam.

Untuk mengatasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) padi, petani masih menggunakan produk berbasis kimia, adapun jenis saprodi yang biasa digunakan petani untuk mengatasi serangan OPT padi adalah insektisida Starban dan Dupont Lannate untuk mengatasi hama penggerek batang dan herbisida Zenus untuk mengatasi gulma. Mengenai ketersediaan saprodi tersebut sebanyak 85 persen petani menyatakan selalu tersedia, dimana petani dapat memperolehnya di kios pertanian yang tersedia pada tingkat desa. Berikut disajikan tabel mengenai peranan lembaga penyedia sarana produksi pertanian bagi usahatani padi di Kabuapten Rokan Hulu.

Tabel 5. Peran Lembaga Sarana Produksi Pertanian

Peran Lembaga Saprodi	Skor	Kategori
Keberadaan Kios Pertanian	4,28	Sangat Berperan
Ketersediaan Saprodi Sesuai Kriteria 6 Tepat	3,70	Berperan
Harga Saprodi	3,68	Berperan
Cara Pembayaran	3,48	Berperan
Kemudahan Penyediaan Saprodi	3,60	Berperan

Lembaga penyedia sarana produksi pertanian “berperan” dalam memotivasi petani meningkatkan produktivitas usahatani padi dengan perolehan skor 3,75. Keberadaan kios pertanian sebagai lembaga penyedia saprodi di tingkat desa memberikan kemudahan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan input produksi, dengan perolehan skor 4,28 kategori “sangat berperan” sementara pada aspek ketersediaan saprodi sesuai kriteria 6 tepat, harga saprodi, cara pembayaran dan kemudahan dalam penyediaan saprodi berada pada ketegori berperan dengan skor diatas 3,40. Setiap pembelian sarana produksi petani biasa membeli dengan cara membayar langsung saat pembelian. Harga saprodi sesuai dengan harga pasaran dan terjangkau bagi petani.

Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan tersedia pada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah yang berbeda-beda, dimana potensi investasi dan putaran roda perekonomian di setiap kecamatan sangat mempengaruhi jumlah dan jenis lembaga keuangan yang tersedia. Adapun jenis lembaga keuangan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Desa sebanyak 148 lembaga, fasilitas Perbankan 25 lembaga, Koperasi usaha Desa 70 lembaga, 46 Koperasi Simpan Pinjam 46 lembaga dan 27 Koperasi lainnya.

Keberadaan lembaga keuangan seharusnya dapat menjadi solusi bagi petani dalam memperoleh sumber modal, namun tidak demikian yang terjadi di lapangan. Persentase petani yang memanfaatkan fasilitas permodalan yang disediakan lembaga keuangan (bank dan Non Bank) hanya 22,5 persen. Sementara sebanyak 35 persen petani menggunakan modal pribadi yang diperoleh dari penjualan hasil panen maupun tabungan, dan 42,5 persen petani mengatasi kekurangan modal usaha dengan meminjam pada saudara atau tetangga. Sistem pengembalian pinjaman, suku bunga dan tingkat resiko yang dihadapi menjadi faktor rendahnya jumlah petani yang mengakses fasilitas permodalan.

Tabel 6. Peran Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Usahatani Padi

Lembaga Keuangan	Skor	Kategori
Ketersediaan Lembaga Permodalan	3,08	Cukup Berperan
Prosedur Pengajuan Pinjaman Modal	2,83	Cukup Berperan
Tingkat Bunga Dan Resiko Pinjaman	2,43	Kurang Berperan

Kemudahan Proses Peminjaman	2,83	Cukup Berperan
Sistem Pengembalian Pinjaman	1,90	Kurang Berperan
Rata-Rata Skor	2,61	Cukup Berperan

Sumber: Data Olahan, 2019

Peran lembaga keuangan dalam pembiayaan usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu memperoleh skor 2,61 dengan kategori “cukup berperan”. Pada aspek ketersediaan lembaga keuangan, prosedur dan kemudahan pengajuan pinjaman berada pada ketegori cukup berperan, sementara pada aspek sistem pengembalian pinjaman, tingkat bunga dan resiko pinjaman memperoleh skor dibawah 2,60 dengan ketegori “kurang berperan”. Kebanyakan petani tanaman pangan berada pada kelas ekonomi kecil yang sangat mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal dalam menjalankan usahatani pada musim tanam selanjutnya.

Lembaga Pascapanen

Lembaga pascapanen adalah setiap komponen yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan hasil panen, pengolahan, penyimpanan, sampai pada pendistribusian ke tangan konsumen. Secara keseluruhan lembaga pascapanen “sangat berperan” dalam mendukung petani mengelola hasil panen dengan perolehan rerata skor 4,38. Selain sebagai jasa penggilingan GKG, lembaga pascapanen juga berperan sebagai saluran pemasaran beras bagi petani padi di Kabupaten Rokan Hulu dengan harga yang cukup baik.

Dari delapan aspek indikator mengukur peran lembaga pascapanen, keberadaan jasa penggilingan pada tingkat desa memperoleh skor tertinggi sebesar 4,68 dengan kategori “sangat berperan”, sementara aspek yang memperoleh skor terendah adalah ketersediaan teknologi pascapanen dalam hal ini yaitu mesin perontok gabah dengan skor 4,15 kategori “berperan”. Peran lembaga pascapanen pada aspek ketersediaan teknologi pascapanen tidak terlepas dari keberadaan kelompok tani di setiap desa, sehingga pemerintah bersedia menyalurkan teknologi pascapanen melalui ketua kelompok tani.

Tabel 7. Peran Lembaga Pascapanen Usahatani Padi Kabupaten Rokan Hulu.

Lembaga Pascapanen	Skor	Kategori
Keberadaan Tempat Penggilingan Padi	4,68	Sangat Berperan
Ketersediaan Teknologi Pascapanen	4,15	Berperan
Sistem Upah	4,35	Sangat Berperan
Sistem Penjualan	4,35	Sangat Berperan
Harga Jual	4,40	Sangat Berperan
Cara Pembayaran	4,45	Sangat Berperan

Kemudahan Proses Penjualan	4,35	Sangat Berperan
Daya Beli	4,35	Sangat Berperan
Rata-Rata Skor	4,38	Sangat Berperan

Sumber: Data olahan, 2019

Musim tanam padi di Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sebanyak dua kali setahun yaitu musim tanam besar pada bulan september-desember yang ditandai dengan curah hujan cukup tinggi sehingga dimanfaatkan pada penanaman padi sistem irigasi. Musim tanam kedua pada bulan mei-agustus saat intensitas hujan sedang. Sementara pada padi ladang musim tanam padi satu kali setahun saat curah hujan kurang yaitu pada bulan januari-april dikarenakan kebutuhan air saat pengembangan padi lading tidak sebanyak varietas padi sawah. Kegiatan pemanenan dilakukan petani secara manual menggunakan sabit dengan memanfaatkan tenaga kerja dalam keluarga, namun pada saat panen besar tenaga kerja luar keluarga tetap dibutuhkan dengan upah Rp 100.000 per HKP. Untuk perontokan gabah petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat memanfaatkan ketersediaan mesin perontok gabah yang tersedia di tingkat desa melalui ketua kelompok tani. Sementara petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani biasa melakukan perontokan gabah dengan cara tradisonal. Untuk pengeringan gabah petani masih mengandalkan panas matahari secara langsung.

Hasil panen yang diperoleh petani lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan beras konsumsi rumah tangga dan persediaan benih musim tanam selanjutnya. Untuk memperoleh beras petani memanfaatkan jasa penggilingan GKG yang tersedia di tingkat desa dengan sistem upah penggilingan Rp 5.000 per kaleng GKG (1 kaleng = 15 kg GKG). Rendahnya nilai upah penggilingan beras di lokasi penelitian di karenakan persaingan harga akibat banyaknya jumlah jasa penggilingan yang tersedia di setiap desa, dimana rata-rata dalam satu desa terdapat 7 tempat penggilingan.

Pemasaran tetap dilakukan petani jika kebutuhan pangan rumah tangga dan benih musim tanam selanjutnya telah terpenuhi. Pemasaran hasil panen dilakukan 65 persen petani melalui pedagang pengumpul yaitu unit penggilingan dalam bentuk GKG dengan harga Rp 4.800 per kg atau dalam bentuk beras seharga Rp 10.000 per kg. sementara sebanyak 35 persen petani memilih untuk melakukan pemasaran sendiri langsung ke konsumen akhir di pasar desa yang tersedia dengan harga Rp 12.000 per kg beras.

Petani padi di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar tergabung dalam kelompok tani, namun kelompok tani tersebut bukan hanya untuk petani padi, karena anggota kelompok tani juga terdiri dari petani kelapa sawit dan karet yang juga memiliki hewan ternak. Kelompok tani di lokasi penelitian ada yang sudah masuk dalam kategori kelompok madya, lanjut dan pemula. Kelompok tani ada yang telah dibentuk sejak tahun 1981. Rata-rata dalam setiap desa terdapat 9 kelompok tani yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani.

Secara keseluruhan kelompok tani berperan dalam peningkatan produktivitas hasil usahatani padi di Kabupaten Rokan Hulu dengan perolehan rata-rata skor 3,63. Peran terbesar yang dirasakan anggota kelompok tani adalah dalam penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian berupa adanya bantuan sarana produksi pupuk NPK dan benih yang disalurkan pemerintah melalui kelompok tani di setiap desa, tersedianya teknologi pengolahan tanah (*handtraktor*) dan mesin perontok gabah memberikan kemudahan bagi petani menjalankan usahatani.

Tabel 8. Peranan Kelompok tani pada usahatani Padi di Kabupaten Rokan Hulu

Peranan Kelompok Tani	Skor	Kategori
Wadah Pembelajaran, Kerjasama, Diskusi Dan Tukar Menukar Informasi	3,55	Berperan
Wadah Penyelesaian Permasalahan Berusahatani	3,28	Cukup Berperan
Penyedia Prasarana Dan Sarana Produksi Pertanian	4,35	Sangat Berperan
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Dan Permodalan	2,80	Cukup Berperan
Penyedia Sistem Dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian	3,05	Cukup Berperan
Wadah Pendidikan, Pendampingan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan	4,10	Berperan
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Informasi	4,28	Berperan
Rata-Rata Skor	3,63	Berperan

Sumber: Data olahan, 2019

Manfaat kelompok tani sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, diskusi dan tukar menukar informasi; wadah pendidikan, pendampingan, penyuluhan dan pemberdayaan; dan adanya kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berada pada kategori berperan dalam peningkatan produktivitas hasil usahatani padi. Hal ini dikarenakan dengan bergabung dalam kelompok tani petani lebih mempunyai akses dalam memperoleh informasi dalam penerapan inovasiteknologi budidaya pertanian terbaru sebagai upaya peningkatan produktivitas hasil dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya lokal. Sementara peran kelompok tani sebagai wadah penyelesaian permasalahan berusahatani, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan penyedia sistem dan sarana

Jurnal Agribisnis Vol: 21 No: 2 Desember 2019 ISSN-P: 1412-4807 ISSN O: 2503-4375
 pemasaran hasil pertanian dirasakan petani cukup berperan sehingga peran-peran tersebut harus dapat ditingkatkan lagi guna memaksimalkan tujuan dari terbentuknya kelompok tani di tengah masyarakat tani.

Lembaga Informasi inovasi

Adapun kebijakan pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015 -2019 seperti disajikan pada tabel peranan pemerintah melalui penerapan sembilan upaya revitalisasi pembangunan pertanian berkelanjutan berikut.

Tabel 9 Peran Pemerintah dalam Peningkatan Produktivitas Padi di Kabupaten Rokan Hulu

Peran Pemerintah	Skor	Kategori
Revitalisasi Regulasi Agraria	1,85	Kurang berperan
Penguatan Infrastruktur Pertanian	4,45	Sangat berperan
Revitalisasi Input Produksi	4,28	Sangat Berperan
Pengembangan SDM Pertanian	3,85	Berperan
Pengembangan alat mesin pertanian	3,60	Berperan
Revitalisasi kelembagaan Pertanian	3,85	Berperan
Pembiayaan Usaha Pertanian	2,68	Cukup berperan
Koordinasi lintas sektor	1,85	Kurang berperan
Penguasaan Teknologi merespon dinamika dan perubahan iklim	1,85	Kurang berperan
Rata-rata	3,14	Cukup berperan

Sumber: Data Olahan, 2019

Petani padi di Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bahwa pemerintah “cukup berperan” dalam memotivasi petani dalam meningkatkan produktivitas hasil usahatani. Peran pemerintah yang paling dirasakan petani padi di Kabupaten Rokan Hulu adalah pada aspek penguatan infrastruktur pertanian dengan perolehan skor 4,45 sementara peran pemerintah yang sangat kurang dirasakan petani adalah pada aspek revitalisasi regulasi agraria, koordinasi lintas sektor dan penguasaan teknologi merespon dinamika dan perubahan iklim dimana skor yang diperoleh masing masing aspek adalah 1,85 dengan kategori “kurang berperan. Penerapan kebijakan pemerintah pada aspek penguatan infrastruktur pertanian dan revitalisasi input produksi berada pada kategori “Sangat berperan” dikarenakan tersedianya prasarana irigasi air dengan kondisi yang baik sehingga sangat membantu petani dalam pengelolaan air pada pengembangan padi sawah.

Peran pemerintah pada aspek pengembangan SDM pertanian, pengembangan alat mesin pertanian dan revitalisasi kelembagaan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu memperoleh skor diatas 3,40 dengan kategori “berperan”.

Peran pemerintah pada tiga aspek tersebut tidak terlepas dari peran tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berkoordinasi dengan camat dan koordinator PPL pada setiap kecamatan dibawah naungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kelembagaan penyuluh merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam menjalankan usahatannya melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian berdasarkan kebutuhan dan kepentingan petani dengan memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian sumberdaya.

Tabel 10. Peran Tenaga PPL di Kabupaten Rokan Hulu

peran penyuluh pertanian	Skor	Kategori
Edukasi	4,23	Berperan
Diseminasi Informasi/Inovasi	3,83	Berperan
Falitasi/pendampingan	3,80	Berperan
Konsultasi/Diskusi Pemecahan Masalah	3,83	Berperan
Supervisi/Pembinaan	3,63	Berperan
Monitoring dan Evaluasi	3,30	cukup berperan
Rata-Rata Skor	3,77	Berperan

Sumber: Data Olahan, 2019

Secara keseluruhan petani padi di Kabupaten Rokan Hulu menyatakan tenaga PPL “berperan” dalam memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitas padi melalui pendampingan dan motivasi yang diberikan tenaga penyuluh. Peran penyuluh yang memperoleh skor tertinggi sebesar 4,23 dengan kategori “berperan” adalah sebagai wadah edukasi, sementara peranan dengan skor terendah pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan perolehan skor 3,30 kategori “cukup berperan”.

Peran penyuluh sebagai wadah edukasi memperoleh skor 3,42 dengan kategori berperan dimana kegiatan penyuluhan menjadi wadah pembelajaran bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki cara bercocok tanam sehingga produktivitas hasil dapat lebih ditingkatkan. Materi yang disampaikan penyuluh sudah sesuai dengan kebutuhan petani namun demikian konsistensi petani dalam menerapkan informasi yang diberikan petani masih rendah terutama pada aplikasi pupuk organik dan pestisida nabati. Hal ini dikarenakan respon pupuk organik dan pestisida nabati yang lebih lama dari pada aplikasi pupuk dan pengendalian OPT secara kimia dan kemudahan dalam pengaplikasian. Selain itu

petani khawatir mengalami gagal panen karena sangat menggantungkan pembiayaan usahatani dari hasil panen pada areal garapan yang tidak terlalu luas.

Peran penyuluh sebagai saluran penyebaran informasi/inovasi memperoleh skor 3,83 dengan kategori “berperan”. Pada deseminasi inovasi teknologi tenaga PPL bertugas untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mensosialisasikan penemuan teknologi dari Badan Litbang Pertanian agar petani mau menerima dan mengaplikasikan dalam kegiatan usahatani. Selain sebagai wadah pembelajaran dan sosialisasi pentingnya input teknologi dalam peningkatan produktivitas padi, tenaga penyuluh juga berperan sebagai pendamping, wadah diskusi bagi petani dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, juga melakukan pembinaan bagi petani dalam meningkatkan efisiensi usaha. Pada ketiga aspek tersebut peran penyuluh berada pada kategori “berperan”. Sementara peran tenaga penyuluh dalam monitoring dan evaluasi memperoleh skor 3,30 dengan kategori “cukup berperan”, hal ini dikarenakan waktu kunjungan tenaga penyuluh bervariasi pada tiap kecamatan. Rata-rata tenaga penyuluh turun kelapangan paling sedikit satu kali per musim tanam dan paling sering dua kali per bulan. Jarak tempuh dan kondisi akses jalan menuju desa menjadi salah satu faktor kurangnya intensitas tenaga PPL turun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan program penyuluhan.

KESIMPULAN

Petani menyatakan kelembagaan agribisnis “Berperan” membantu petani menghadapi berbagai permasalahan yang muncul pada pelaksanaan usahatani dan mendukung peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Rokan Hulu dengan perolehan skor 3,55. Lembaga pascapanen adalah kelembagaan yang “sangat berperan” dengan perolehan skor 4,38. Sementara lembaga permodalan dan lembaga perguruan tinggi kurang dirasakan petani peranannya dalam menunjang kegiatan usahatani sebagai upaya peningkatan produktivitas padi. Lembaga penyedia sarana produksi pertanian tersedia di tingkat desa dan berperan dalam penyediaan sarana produksi terutama pupuk kimia, pestisida dan alat pertanian dengan harga yang cukup terjangkau bagi petani. Lembaga keuangan cukup berperan dalam penyediaan pembiayaan usahatani padi, namun persentase petani yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan rendah (22,5%) dimana sistem pengembalian pinjaman, suku bunga dan tingkat resiko yang akan dihadapi

menjadi pertimbangan utama bagi petani. Lembaga Pascapanen termasuk di dalamnya pemasaran hasil panen “sangat berperan” bagi petani dalam mengelola dan memasarkan hasil panen, jasa penggilingan tersedia sampai tingkat desa dengan upah penggilingan GKG, daya beli hasil panen, penetapan harga dan sistem pembayaran memberikan keberpihakan pada petani. Dibentuknya lembaga petani di setiap desa “berperan” dalam kegiatan usahatani karena dengan bergabung dalam kelompok tani petani mempunyai akses bantuan saprodi ber subsidi dan teknologi mesin pertanian dari pemerintah, memperoleh informasi dalam penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian terbaru sebagai upaya peningkatan produktivitas hasil dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya lokal. Pemerintah “cukup berperan” dalam memotivasi petani dalam meningkatkan produktivitas hasil usahatani terutama dalam aspek penguatan infrastruktur pertanian dan revitalisasi input produksi. Lembaga penyuluhan sebagai bagian dari pemerintah dalam pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan petani “berperan” dalam usahatani padi sebagai wadah edukasi, fasilitasi, diseminasi informasi/ inovasi, konsultasi dan supervisi. Sementara peran lembaga perguruan tinggi masih kurang dirasakan petani secara langsung dalam pembinaan petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Islam Riau yang bersedia menjadi sumber pendanaan dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Riau, 2017. Luas Panen Tanaman Pangan menurut Jenis dan Kabupaten/Kota, 2015 (Ha). <https://riau.bps.go.id/statictable/2017/01/23/298/-luas-panen-tanaman-pangan-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-2015-ha-.html>. diakses pada 31 Agustus 2019.
- BPS Rokan Hulu. 2019. Publikasi. <https://rohulkab.bps.go.id/publikasi.html>. diakses pada 31 Agustus 2019.
- BPPSDMP Kementrian Pertanian. 2016. Database Ketenaga Penyuluhan Pertanian sampai dengan November 2016. <http://bppsdp.pertanian.go.id/storage/app/media/KIP/INFORMASI%20T>

ERBUKA/Database%20Kelembagaan%20Penyuluh%20Pertanian/DATABASE%20KELEMBAGAAN%20PENYULUHAN%20PERTANIAN%202016%20(1).pdf. diakses pada 27 Oktober 2019.

BPOM Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan .
http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/lain-lain/UU_Nomor_18_Tahun2012_Tentang_Pangan.pdf. diakses pada 31 Agustus 2019.

Hanafie, Rita. 2010. Pengantar ekonomi Pertanian Edisi I. Yogyakarta. CV Andi.

Rifai, Moh. 2015. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Yogyakarta. Pusat Studi Pancasila UGM

Syarif, Asriyanti dan Mutmainnah Zainuddin. 2017. Inti Sari Sosiologi Pertanian. Makassar. CV. Inti Mediatama.